



# LAPORAN KEUANGAN (LK) TAHUNAN AUDITED TAHUN 2023 BALAI KIPM MATARAM

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

**Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,  
dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram**

Jalan Adi Sucipto, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan,  
Mataram – Nusa Tenggara Barat

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, 8 Mei 2024

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan  
Mataram



Suh Anggra Lasmika, S.Pi., M. Tr.Pi.  
P. 19830315 200604 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Pernyataan Telah Direview	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1 Pendapatan	
B.2 Belanja	
B.3 Belanja Pegawai	
B.4 Belanja Barang	
B.5 Belanja Modal	
B.5.1 Belanja Modal Tanah	
B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
B.6 Belanja Bantuan Sosial	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	23

- C.1. Aset Lancar
  - C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
  - C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
  - C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
  - C.1.4. Piutang Bukan Pajak
  - C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi TP/TGR)
  - C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
  - C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
  - C.1.8. Beban Dibayar di Muka
  - C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
  - C.1.10. Persediaan
- C.2. Aset Tetap
  - C.2.1. Tanah
  - C.2.2. Peralatan dan Mesin
  - C.2.3. Gedung dan Bangunan
- D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 36
  - D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
  - D.2 Beban Pegawai
  - D.3 Beban Persediaan
  - D.4 Beban Barang dan Jasa
  - D.5 Beban Pemeliharaan
  - D.6 Beban Perjalanan Dinas
  - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
  - D.8 Beban Bantuan Sosial
  - D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
  - D.11 Kegiatan Non Operasional
  - D.12 Pos Luar Biasa
- E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 42
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

E.4.5. Koreksi Lain-lain

E.5. Transaksi Antar Entitas

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

E.6. Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan - Pengungkapan Lainnya

45

IV. Lampiran dan Daftar

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 8 Mei 2024

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan  
Mataram



  
Luh Anggra Lasmika, S.Pi.,M. Tr.Pi.  
NIP. 19830315 200604 2 001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram untuk Tahunan tahun anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan  
Mataram



Ni Luh Anggra Lasmika, S.Pi.,M. Tr.Pi.  
NIP. 19830315 200604 2 001

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp117.575.000 atau mencapai 102 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp115.350.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 10.240.394.059 atau mencapai 99,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.292.434.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.051.204.891 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp45.524.369; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18.005.680.522; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp24.181.813 dan Rp18.027.023.078

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp117.575.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp11.348.420.191 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(11.230.845.191). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(11.230.845.191).



#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp19.131.966.710 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(11.230.845.191) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.125.901.559 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp18.027.023.078.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	Th 2023				Th 2022
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	115.350.000	117.575.000	2.225.000	102	138.002.929
<b>Jumlah Pendapatan dan Hibah</b>		<b>115.350.000</b>	<b>117.575.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>102</b>	<b>138.002.929</b>
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	6.274.806.000	6.265.565.555	(9.240.445)	100,00	5.808.642.788
Belanja Barang	B.4	3.932.107.000	3.889.974.584	(42.132.416)	99,00	3.071.933.695
Belanja Modal	B.5	85.521.000	84.853.920	(667.080)	99,00	226.276.000
Belanja Bnatuan Sosial	B.6	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>10.292.434.000</b>	<b>10.240.394.059</b>	<b>(52.039.941)</b>	<b>99,00</b>	<b>9.106.852.483</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**BALAI KIPM MATARAM**  
**NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	0
Bagian Lancar Tagihan			
Tuntutan/Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Pitang Jangka Pendek	C.1.7	0	0
Beban dibayar diMuka	C.1.8	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	0	0
Persediaan	C.1.10	45.524.369	219.827.564
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>45.524.369</b>	<b>219.827.564</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	5.892.144.000	5.892.144.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	7.481.952.080	7.397.098.160
Gedung dan Bangunan	C.2.3	11.808.448.021	11.808.448.021
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	206.888.000	206.888.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(7.383.751.579)	(6.369.227.204)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>18.005.680.522</b>	<b>18.935.350.977</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	0	0
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Pitang Jangka Panjang	C.3.3	0	0
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	0	0
Aset Lain-lain	C.4.2	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3		
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>18.051.204.891</b>	<b>19.155.178.541</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	24.181.813	23.211.831
Pendapatan Dietrima di Muka	C.5.3	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.4	0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>24.181.813</b>	<b>23.211.831</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>24.181.813</b>	<b>23.211.831</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.7	18.027.023.078	19.131.966.710
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>18.027.023.078</b>	<b>19.131.966.710</b>
<b>JUMMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>18.051.204.891</b>	<b>19.155.178.541</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**BALAI KIPM MATARAM**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	117.575.000	114.465.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>117.575.000</b>	<b>114.465.000</b>
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.265.565.555	5.796.870.493
Beban Persediaan	D.3	482.788.479	238.675.926
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.148.638.215	1.966.691.318
Beban Pemeliharaan	D.5	596.064.377	472.222.849
Beban Perjalanan Dinas	D.6	840.839.190	342.452.856
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Pebyusutan dan Amortisasi	D.9	1.014.524.375	1.175.658.733
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>11.348.420.191</b>	<b>9.992.572.175</b>
<b>SURFLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(11.230.845.191)</b>	<b>(9.878.107.175)</b>
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surflus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	(1.050.942.559)
Pendapatan Pejualan Aset Non Lancar		0	21.777.000
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	1.072.719.559
Surflus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	(9.716.378)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	252
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	(9.716.378)
<b>JUMLAH SURFLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11	<b>0</b>	<b>(1.060.658.937)</b>
<b>SURFLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(11.230.845.191)</b>	<b>(10.938.766.112)</b>
POS LUAR BIASA	D.12	0	0
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURFLUS (DEFISIT) LO</b>		<b>(11.230.845.191)</b>	<b>(10.938.766.112)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**BALAI KIPM MATARAM  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	19.131.966.710	21.097.305.999
SURFLUS/DEFISIT-LO	E.2	(11.230.845.191)	(10.938.766.112)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	127.769
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	0	127.769
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	0	0
<b>JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	10.125.901.559	8.973.299.054
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.104.943.632)	(1.965.339.289)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>18.027.023.078</b>	<b>19.131.966.710</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**A. PENJELASAN UMUM****A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor BKIPM Mataram**

*Dasar Hukum Entitas  
dan Rencana  
Strategis*

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram di dirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Kel. Pejarakan, Kec. Ampenan, Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat.

Selaras dengan visi pembangunan nasional serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia maka Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri maju kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) dan Balai KIPM Mataram sebagai UPT BKIPM, maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, maka Visi pembangunan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2021-2024 adalah; **“Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya”**.

Sejalan dengan visi BKIPM. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram berkomitmen dengan visi **“Nusa Tenggara Barat sebagai sentra ikan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi.”**

Ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan).

Untuk mewujudkannya Balai Karantina Ikan. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram memiliki misi sebagai berikut :

- Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
- Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
- Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan UPT Balai KIPM Mataram dengan tugas di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah negara RI, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran tersebut diharapkan dapat melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan TA 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI, SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

## **A.3 Basis Akuntansi**

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset



tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram adalah sebagai berikut:

*Pendapatan- LRA*

**(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan LO*

**(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

*Belanja*

**(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

*Aset*

**5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah, Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

#### *Aset Tetap*

##### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi. Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun

Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### *Ekuitas*

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

### Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	115.350.000	115.350.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>115.350.000</b>	<b>115.350.000</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	5.798.482.000	6.274.806.000
Belanja Barang	3.932.107.000	3.932.107.000
Belanja Modal	85.521.000	85.521.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.816.110.000</b>	<b>10.292.434.000</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp117.575.000

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp117.575.000 atau mencapai 101,93 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp115.350.000. Pendapatan Satuan Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya dan pendapatan Jasa Karantina Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	114.890.000	102.640.000	89,34

Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	460.000	14.935.000	3246,74
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>115.530.000</b>	<b>117.575.000</b>	<b>101,93</b>

Realisasi pendapatan pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar (14,80) persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	102.640.000	103.040.000	-0,39
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	14.935.000	11.425.000	30,72
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	21.777.000	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.760.929	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>117.575.000</b>	<b>138.002.929</b>	<b>-14,80</b>

Realisasi Belanja  
Rp10.240.394.059

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja Kantor Akuntansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp Rp10.240.394.059.000 atau 99,53 persen dari anggaran belanja sebesar Rp10.292.434.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.274.806.000	6.268.153.721	99,89
Belanja Barang	3.932.107.000	3.890.947.084	98,95
Belanja Modal	85.521.000	84.853.920	99,22
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>10.292.434.000</b>	<b>10.243.954.725</b>	<b>99,53</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0</b>	<b>3.560.666</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>10.292.434.000</b>	<b>10.240.394.059</b>	<b>99,49</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,45 persen dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022.



Perbandingan Realisasi Belanja  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	6.265.565.555	5.808.642.788	7,87
Belanja Barang	3.889.974.584	3.071.933.695	26,63
Belanja Modal	84.853.920	226.276.000	-62,50
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>10.240.394.059</b>	<b>9.106.852.483</b>	<b>12,45</b>

*Belanja Pegawai  
Rp6.265.565.555*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.265.565.555 dan Rp5.808.642.788. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang sudah berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,87 persen dari TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.127.984.160	2.093.084.420	1,67
Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.641	29.533	-6,41
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155.382.490	151.830.180	2,34
Belanja Tunj. Anak PNS	59.094.378	56.256.924	5,04
Belanja Tunj. Struktural PNS	32.760.000	32.860.000	-0,30
Belanja Tunj. Fungsional PNS	172.675.000	177.805.000	-2,89
Belanja Tunj. PPh PNS	5.147.610	5.312.231	-3,10
Belanja Tunj. Beras PNS	132.311.340	129.993.900	1,78
Belanja Uang Makan PNS	334.582.000	353.692.000	5,40
Belanja Tunjangan Umum PNS	20.535.000	19.055.000	7,77

Belanja Uang Lembur	180.695.000	129.184.000	39,87
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.046.959.102	2.660.460.744	14,53
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6.268.153.721</b>	<b>5.809.563.932</b>	<b>7,89</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>(2.588.166)</b>	<b>(921.144)</b>	<b>180,97</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.265.565.555</b>	<b>5.808.642.788</b>	<b>7,87</b>

*Belanja Barang*  
*Rp3.889.974.584*

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.889.974.584 dan Rp3.071.933.695. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 26,63% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Operasional Barang	1.089.296.122	1.227.350.120	-11,25
Belanja Operasional Barang Non Operasional	177.597.400	70.295.950	152,64
Belanja Persediaan	342.658.291	322.653.760	6,20
Belanja Jasa	886.163.211	668.881.970	32,48
Belanja Pemeliharaan	559.392.870	441.124.039	26,81
Belanja Perjalanan Dinas	835.839.190	346.422.856	141,28
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.890.947.084</b>	<b>3.076.728.695</b>	<b>25,99</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>(972.500)</b>	<b>(4.795.000)</b>	<b>-79,72</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.889.974.584</b>	<b>3.071.933.695</b>	<b>26,63</b>

*Belanja Modal*  
*Rp84.853.920*

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp84.853.920 dan Rp226.276.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar -62,50% dibandingkan TA 2022

## Perbandingan Realisasi Belanja Modal

TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.853.920	226.276.000	-62,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>84.853.920</b>	<b>226.276.000</b>	<b>-62,50</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>84.853.920</b>	<b>226.276.000</b>	<b>-62,50</b>

*Belanja Modal Tanah Rp0*

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022.

## Perbandingan Realisasi Belanja Tanah

TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp84.853.920*

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp84.853.920 atau sebesar -62,50 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp226.276.000.

## Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin

TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.853.920	226.276.000	-62,50
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>84.853.920</b>	<b>226.276.000</b>	<b>-62,50</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>84.853.920</b>	<b>226.276.000</b>	<b>-62,50</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0*

### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0*

### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Bantuan Sosial Rp0*

### B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aset Lancar  
Rp45.524.369

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp45.524.369 dan Rp 219.827.564.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1.1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Bank Mandiri No. Rek. 8100125677581000	0	0
Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0

#### C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.1.2

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan Setara Kas  
Rp0

### C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Tabel C.1.3*  
*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022*  
*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Piutang Bukan Pajak  
Rp0

### C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.1.4*  
*Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022*  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)  
R0

### C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.1.5*  
*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	TGR	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Bagian Lancar Tagihan  
Penjualan Angsuran  
Rp0*

#### **C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Tabel C.1.6*  
*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.		0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jk. Pendek Rp0*

#### **C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Karantina Ikan. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataramper TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.1.7*  
*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek*  
*(dalam rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	0	0.5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0

Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	0	0.5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	0	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	0	0.5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Beban Dibayar di Muka  
Rp0

#### C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka Balai Karantina Ikan. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.8  
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Nihil	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima  
Rp0

#### C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai Karantina Ikan. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1.9  
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
TA 2023 dan 2022

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Yang Masih Harus di Terima	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Persediaan

Rp 45.524.369

**C.1.10. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp45.524.369 dan Rp 219.827.564 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.1.10  
Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	22.450.060	37.138.570
Barang untuk Pemeliharaan	0	325.000
Suku Cadang	10.531.596	37.875.550
Bahan Baku	12.542.713	154.507.600
Persediaan Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>45.524.369</b>	<b>219.827.564</b>

## Aset Tetap

Rp18.005.680.522

**C.2. Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp Rp18.005.680.522 dan Rp18.935.350.977. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

## Tanah

Rp5.892.144.000

**C.2.1. Tanah**

Tanah yang dimiliki oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.892.144.000 dan Rp 5.892.144.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

*Tabel C.2.1  
Rincian Mutasi Tanah*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	5.892.144.000
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	0
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>5.892.144.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>5.892.144.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.2.1.1  
Rincian Tanah TA 2023*

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	3.270	- Jl. Adisucipto Kota Mataram - Jl. Raya Pelabuhan Kayangan Lombok Timur - Jl. Raya Pelabuhan Lembar Lombok Barat	5.892.144.000
<b>Jumlah</b>			<b>5.892.144.000</b>

*Peralatan dan Mesin*

Rp7.481.952.080

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.481.952.080 dan Rp 7.397.098.160.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel C.2.2*

*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>7.397.098.160</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	84.853.920
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Tambah	0
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentian aset dari penggunaan	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>7.481.952.080</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</b>	<b>(5.944.392.786)</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>1.537.559.294</b>

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Pembelian Alat Ukur 1 PC senilai Rp 9.850.000;

Pembelian Alat Kantor 7 PC senilai Rp14.053.000

Pembelian Alat Rumah Tangga 9 PC senilai Rp 28.775.920

Pembelian Unit Alat Laboratorium 1 PC senilai Rp 4.850.000

Pembelian alat laboratorium standarisasi kalibrasi 1 Unit senilai Rp 3.980.000

Komputer Unit 1 senilai Rp19.195.000 dan Peralatan computer 1 buah senilai Rp4.150.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp11.808.448.021 dan Rp11.808.448.021

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel C.2.3  
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	11.808.448.021
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2023	11.808.448.021
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(962.656.046)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	10.845.791.975

**C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp206.888.000 dan Rp206.888.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.2.4  
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	206.888.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2023	206.888.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(28.807.196)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	178.080.804

**C.2.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

*Tabel C.2.5  
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp0

### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(7.383.751.579)

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(7.383.751.579) dan Rp(6.369.227.204). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat. Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Tabel C.2.7  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	5.892.144.000	0	5.892.144.000
2.	Peralatan dan Mesin	7.481.952.080	5.944.392.786	1.537.559.294
3.	Gedung dan Bangunan	11.808.448.021	962.656.046	10.845.791.975
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	206.888.000	28.807.196	178.080.804
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>18.005.680.522</b>	<b>7.383.751.579</b>	<b>18.453.576.073</b>

Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0

### C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp0

#### C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian

atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Tabel C.3.1*  
*Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Piutang	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tagihan Penjualan  
Angsuran Rp0

### C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 **Desember** 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Tabel C.3.2*  
*Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang Rp0

### C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Tabel C.3.3*  
*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	0	0.5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tagihan TPA</b>			
Lancar	0	0.5%	0

Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Aset Lainnya  
Rp0

#### C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak Berwujud  
Rp0

##### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.1  
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	0
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Mutasi tambah:

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.1  
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aset tak berwujud	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Aset Lain-Lain  
Rp0

##### C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.2  
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	0
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Tidak terdapat aset lain-lain. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya Rp0

### C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.3  
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan  
Aset Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.				
	Jumlah		NIHIL	
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah			
	Total			

Kewajiban Jangka  
Pendek Rp0

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN  
Rp Rp0

#### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka

kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp24.181.813*

### C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.181.813 dan 23.211.831. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai Karantina Ikan. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel C.5.2  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023*

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	24.181.813
<b>Total</b>		<b>24.181.813</b>

*Pendapatan Diterima  
di Muka Rp0*

### C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.5.3  
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023*

*(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah
Nihil	
<b>Jumlah</b>	

*Beban yang Masih  
Harus Dibayar  
Rp24.181.813*

### C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. dengan rincian sebagai berikut:



Tabel C.5.4  
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Belanja Barang yang masih harus dibayar	24.181.813	23.211.831
<b>Jumlah</b>	<b>24.181.813</b>	<b>23.211.831</b>

Ekuitas

Rp18.027.023.078

### C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp Rp18.027.023.078 dan Rp 19.131.966.710. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Pendapatan PNB  
Rp 117.575.000

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp117.575.000 dan Rp114.465.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	102.640.000	103.040.000	-0,39
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	14.935.000	11.425.000	30,72
<b>Jumlah</b>	<b>117.575.000</b>	<b>114.465.000</b>	<b>2,72</b>

Pendapatan berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya dan Pendapatan Jasa Karantina Perikanan.

Beban Pegawai  
Rp6.265.565.555

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp Rp6.265.565.555 dan Rp 5.808.642.788. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.127.984.160	2.093.084.420	1,67
Beban Pembulatan Gaji PNS	27.425	28.389	-3,40
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	155.382.490	151.830.180	2,34
Beban Tunj. Anak PNS	59.094.378	56.256.924	5,04
Beban Tunj. Struktural PNS	32.760.000	31.320.000	4,60
Beban Tunj. Fungsional PNS	172.675.000	176.885.000	-2,38
Beban Tunj. PPh PNS	5.147.610	5.312.231	-3,10
Beban Tunj. Beras PNS	132.311.340	129.993.900	1,78
Beban Uang Makan PNS	334.582.000	352.749.000	-5,15
Beban Tunjangan Umum PNS	20.535.000	19.055.000	7,77
Beban Uang Lembur	178.107.050	129.184.000	37,87
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.046.959.102	2.651.171.449	14,93
<b>Jumlah Beban</b>	<b>6.265.565.555</b>	<b>5.808.642.788</b>	<b>7,879</b>

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp482.788.479 dan Rp 238.675.926. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	113.767.088	102.315.934	11,19
Beban Persediaan bahan baku	369.021.391	136.359.992	170,62
<b>Jumlah Beban</b>	<b>482.788.479</b>	<b>238.675.926</b>	<b>102,28</b>

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp Rp2.148.638.215 dan Rp 1.966.691.318. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	764.233.708	788.843.970	-3,12
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	82.204.000	79.836.000	2,97
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	4.755.914	10.653.195	-55,36
Beban Honor Operasional Satkerja	170.280.000	232.218.000	-26,67
Beban Barang Operasional Lainnya	67.434.000	87.629.890	-23,05
Beban Bahan	166.437.400	56.310.950	195,57
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	8.160.000	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000	1.500.000	100,00
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	3.600.000	-100,00
Beban Langganan Listrik	211.600.825	215.928.672	1,84
Beban Langganan Telepon	64.098.332	62.941.193	-28,37

Beban Langganan Air	17.127.401	23.912.437	21,53
Beban Sewa	181.411.000	149.270.046	137,07
Beban Jasa Profesi	27.500.000	11.600.000	86,05
Beban Jasa Lainnya	380.395.635	204.457.900	-100,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	28.169.065	-100,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.660.000	9,25
<b>Jumlah Beban</b>	<b>2.148.638.215</b>	<b>1.966.691.318</b>	<b>1,84</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp596.064.377

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp596.064.377 dan Rp 472.222.849. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	321.181.674	278.518.600	15,32
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	237.627.196	162.605.439	46,14
<b>Jumlah Beban</b>	<b>596.064.377</b>	<b>472.222.849</b>	<b>0,81</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp840.839.190

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp840.839.190 dan Rp342.452.856. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	453.400.919	259.904.497	364,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.750.000	7.050.000	369,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	354.688.271	75.498.359	145,53
<b>Jumlah Beban</b>	<b>840.839.190</b>	<b>342.452.856</b>	<b>364,54</b>

Beban Barang untuk  
Diserahkan Kepada  
Masyarakat Rp0

#### D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Nihil	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beban Bantuan Sosial  
Rp0

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp1.014.524.375

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.014.524.375 dan Rp1.175.658.733. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	766.858.612	927.992.971	-17,36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	242.428.091	242.428.090	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.237.672	5.237.672	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.014.524.375</b>	<b>1.175.658.733</b>	<b>-13,71</b>
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.014.524.375</b>	<b>1.175.658.733</b>	<b>-13,71</b>

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp0

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kegiatan Non Operasional Rp0

#### D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penjualan Alat Kantor	0	21.777.000	-100
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	252	-100
Beban Pelepasan Aset	0	1.072.719.559	-100
Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>(1,060,658,937)</b>	<b>-100</b>

*Pos Luar Biasa Rp0***D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah Rp0.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
Rp19.131.966.710

**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp19.131.966.710 dan Rp21.097.305.999

*Defisit LO*  
Rp11.230.845.191

**E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp11.230.845.191 dan Rp10.938.766.112. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi*  
Rp0

**E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai  
Aset* Rp0

**E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan* Rp0

**E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel E.4.2*  
*Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023*

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	Nihil
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>

*Selisih Revaluasi Aset*  
Rp0

**E.4.3. Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.



**E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp127.769. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

*Tabel E.4.4*  
*Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Koreksi Lain-lain Rp0

**E.4.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang, Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel E.4.5*  
*Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023*

Jenis Koreksi	Jumlah
	0
	0
nihil	0
	0
	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp10.125.901.559

**E.5. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp Rp10.125.901.559 dan Rp 8.973.299.054. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L antar K/L. antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Tabel E.5*  
*Transaksi Antar Entitas TA 2023*

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	117,575,000
Ditagihkan ke Entitas Lain	(10,240,394,059)
Transfer Masuk	(3.082.500)
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>(10.125.901.559)</b>

**E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023. DDEL sebesar Rp117.575.000 sedangkan DKEL sebesar Rp 10.240.394.059.

**E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.082.500 terdiri dari:

*Tabel E.5.2  
Transfer Masuk TA 2023*

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Persediaan	Dari Badan KIPM	3.082.500
<b>Jumlah</b>			<b>3.082.500</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.082.500 yang merupakan transfer Persediaan dari BKIPM ke kantor Balai KIPM Mataram

**E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, Barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel E.5.3  
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023*

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
<b>Total Pengesahan</b>		NIHIL	
<b>Pengesahan Pengembalian Hibah</b>			-
<b>Jumlah</b>			

*Ekuitas Akhir Rp  
18.027.023.078*

**E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp18.027.023.078 dan Rp19.131.966.710.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

*Terdapat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 3/MEN-KP/KU.110/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Tentang Perubahan ke Enam Puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor kep.79/men/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah yaitu ;*

*Nama : Ni Luh Anggra Lasmika, S.St.Pi.,M.Tr.Pi.*

*NIP : 19830315 200604 2 001*

### **F.1 Pengungkapan Lain-lain**

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.86/MEN/KU.611/2021 perubahan Keduapuluh Lima atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja adalah:
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Obing Hobir As'ari, S.Pi., MP.
2. Atas Nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Nomor; KEP. 03/BKIPM-07/KU.110/2023 tanggal 02 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram.
  - Bendahara Pengeluaran : Sitta Adlinasari, A. Md
  - Bendahara Penerimaan : Ganti Cahyani, S. Sos
3. Atas Nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Nomor; KEP. 02/BKIPM-07/KU.110/2023 tanggal 02 Januari 2023 Tentang Tentang Penetapan Pejabat Pembuatan Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Balai KIPM Mataram.
  - Pejabat Penandatanganan SPM : I Putu Panca Yasa, S.Pi.
  - Pejabat Pembuat Komitmen : M. Farchan, S. Pi.,MP.

4. Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram B.04/07.0/OT.220/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 hal Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
  - Fian K. Ardiansyah, S. Sos
5. Surat Penugasan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram nomor : B.06/BKIPM.MTR/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 hal Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Fian K. Ardiansyah, S.Sos
6. Surat Penugasan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram nomor : B.11/BKIPM.MTR/I/2023 hal Penetapan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN).
  - Pengurus/ penyimpan Barang Milik Negara BMN) : Paulus Nara Kaha
  - Pengelola Persediaan : Lazarus Babur, S. Kom
7. Surat Penugasan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram nomor : B.12/BKIPM.MTR/I/2023 hal Penetapan Pengelola SAIBA/SAKTI Modul GLP.
  - Raminah, S.Sos
8. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah Bank Mandiri A/C 161-00-0557101-8 a.n. BPG 038 BALAI KIPM MATARAM (567758) dengan saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Uang Tunai di Brankas Rp0 dan berupa kuitansi Rp0.
9. Anggaran Belanja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.13.2.567758/2023 tanggal 30 November 2022 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp10.292.434.000 yang sumber berasal dari Rupiah Murni Rp10.212.958.000 dan PNBPNP Rp79.476.000 (estimasi pendapatan Rp115.350.000). Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 telah terjadi revisi sebanyak 8 kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :
  1. Revisi Pertama, merupakan revisi halaman III DIPA pada Tanggal: 15 Februari 2023
  2. Revisi kedua, merupakan revisi halaman III DIPA pada Tanggal: 13 April 2023

3. Revisi ke tiga, merupakan revisi halaman III DIPA Pergeseran KRO pagu tetap dalam rangka kegiatan BMK dan Bimtek Ekspor tahun 2023 pada tanggal 2 Juli 2023
4. Revisi ke empat, merupakan revisi halaman III DIPA tanggal 10 Juli 2023
5. Revisi ke lima merupakan revisi pembukaan pagu blokir tanggal 19 Oktober 2023 dengan pagu semula Rp9.816.110.000 menjadi 10.292.434.000
6. Revisi ke enam merupakan revisi pemutakhiran data POK tanggal 24 November 2023
7. Revisi ke tujuh merupakan revisi pemutakhiran data POK tanggal 8 Desember 2023
8. Revisi ke delapan merupakan revisi pemutakhiran data POK tanggal 27 Desember 2023
10. Terdapat transfer masuk berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Ekspor (KI-D1) sebanyak 750 eksemplar sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan Nomor 143/BKIPM.1/PL.520/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
11. Terdapat Pengembalian Belanja pada akun 523121 senilai Rp. 584.00, NTPN B64167N8005HMOUA tanggal 10 Maret 2023 karena kelebihan pembayaran belanja peralatan dan mesin.
12. Terdapat Pengembalian Belanja pada akun 521111 senilai Rp338.500, NTPN B64167N8005HMOUA tanggal 10 Maret 2023 karena terjadi kelebihan pembayaran belanja keperluan perkantoran
13. Terdapat Pengembalian Belanja pada akun 512211 senilai Rp1.912.500, NTPN ED8017N8Q1BKK70E tanggal 18 Agustus 2023 karena kelebihan pembayaran belanja uang lembur (salah perekaman jumlah jam kerja lembur)
14. Terdapat belanja sewa untuk Tempat Pemeriksaan Fisik Ikan yaitu di Bandara Internasional Lombok dengan nomor SPM 00080A tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp33.966.000
15. Terdapat Belanja Sewa untuk kantor Wilayah Kerja Brangbiji bertempat di Sumbawa Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan nomor SPM 0008A tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp57.000.000.
16. Terdapat Belanja sewa kode akun 522141 (sewa kendaraan) dengan Nomor SPM 258A tanggal 10 Agustus 2023 senilai Rp25.300.000 untuk sewa Kendaraan insidental dalam rangka mendukung kegiatan yang tidak

mampu di akomodir kendaraan dinas yang ada di kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dalam kegiatan Pembukaan Pekan Pelayanan Tahun 2023

17. Terdapat belanja sewa kode akun 522141 (sewa kendaraan) dengan nomor SPM 260A tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp7.700.000 untuk Pembukaan Pekan Pelayanan Tahun 2023
18. Terdapat Belanja sewa kode akun 522141 (sewa kendaraan) dengan nomor SPM 259A tanggal 10 Agustus 2023 senilai Rp3.550.000 untuk kegiatan Pembukaan Pekan Pelayanan Tahun 2023
19. Pendapatan Negara Bukan Pajak samapai dengan periode 31 Desember 2023 senilai Rp 117.575.000 atau mencapai 101,93 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp115.350.000. Pendapatan Satuan Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya dan Pendapatan Jasa Karantina.
20. Termonitoring terdapat saldo tidak bulat ribuan rupiah yang disebabkan oleh penyetoran pengembalian uang lembur secara neto, untuk selanjutnya KPPN Mataram mengharapkan dapat menyetorkan secara bruto.